



## KONTRUKSI MASKULINITAS DAN SUBKULTUR KEKERASAN (STUDI KRIMINOLOGIS ATAS FENOMENA "BUSUR" DI KALANGAN REMAJA KOTA MAKASSAR)

**Hairul Saleh Satrul**

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email: [hairul.saleh.satrul@unm.ac.id](mailto:hairul.saleh.satrul@unm.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan remaja yang menggunakan senjata tajam jenis busur di Kota Makassar melalui lensa kriminologi dan sosiologi. Tingginya angka kriminalitas jalanan ini menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*literature review*) dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai artikel jurnal, buku teks, dokumen hukum, dan laporan kepolisian. Hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena ini berakar pada distorsi nilai kearifan lokal *Siri' Na Pacce* yang disalahartikan sebagai pembenaran untuk melakukan balas dendam komunal. Selain itu, konstruksi maskulinitas hegemonik mendorong remaja laki-laki untuk membuktikan keberanian mereka melalui agresi fisik dan penggunaan senjata rakitan. Subkultur kekerasan ini semakin diperkuat oleh segregasi tata ruang perkotaan ("anak lorong"), kemudahan merakit senjata, serta provokasi yang meluas melalui media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum represif tidak cukup efektif akibat kendala Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Implikasinya, diperlukan rekayasa kebijakan sosial yang holistik, seperti optimalisasi program *Jagai Anakta* dan penyediaan ruang vokasi, untuk mereintegrasi remaja ke dalam ikatan sosial yang konvensional dan positif.

**Kata Kunci:** Busur Makassar, Kriminologi, Maskulinitas, *Siri' Na Pacce*, Kekerasan

### ABSTRACT

*This study aims to examine the phenomenon of juvenile violence using homemade arrows (busur) in Makassar City through criminological and sociological lenses. The high rate of street crime poses a serious threat to urban community security. This research employs a literature review method by collecting secondary data from various journal articles, textbooks, legal documents, and police reports. The analysis results indicate that this phenomenon is rooted in the distortion of local wisdom *Siri' Na Pacce*, which is misinterpreted as a justification for communal revenge. Additionally, the construction of hegemonic masculinity drives adolescent boys to prove their bravery through physical aggression and the use of homemade weapons. This subculture of violence is further reinforced by urban spatial segregation ("anak lorong"), the ease of weapon assembly, and widespread provocation via social media. The conclusion of this study emphasizes that repressive law enforcement approaches are insufficiently effective due to the constraints of the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA). The implication is that holistic social policy engineering, such as optimizing the *Jagai Anakta* program and providing vocational spaces, is required to reintegrate adolescents into conventional and positive social bonds.*

**Keywords:** Busur Makassar, Criminology, Masculinitas, *Siri' Na Pacce*, Violence

## A. PENDAHULUAN

Dinamika kriminalitas di wilayah perkotaan senantiasa bermetamorfosis seiring dengan laju modernisasi, marginalisasi sosial struktural, dan pergeseran nilai-nilai kultural yang mendasarinya.[1] Peningkatan populasi dan kesenjangan ekonomi di kota-kota besar sering kali menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang menjadi episentrum lahirnya berbagai patologi sosial. Dalam ekosistem yang terpinggirkan ini, remaja sering kali menjadi kelompok demografi yang paling rentan terpapar oleh pengaruh lingkungan yang menyimpang.[2] Ketidakmampuan institusi sosial dasar dalam mengintegrasikan mereka secara positif mendorong munculnya bentuk-bentuk ekspresi kekerasan baru yang semakin membahayakan.

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, fenomena kenakalan remaja telah bertransformasi secara radikal dari sekadar perkelahian tangan kosong yang sporadis menjadi sebuah subkultur kekerasan bersenjata yang terorganisir.[3] Berdasarkan berbagai laporan kepolisian dan temuan sosiologis, kekerasan jalanan di kota ini tidak lagi dilakukan secara insidental, melainkan telah menjadi sebuah rutinitas kelompok yang memiliki tingkat fatalitas sangat tinggi.

Simbol utama dari eskalasi kekerasan jalanan ini adalah penggunaan proyektil buatan sendiri yang secara lokal dikenal dengan sebutan "busur".[4] Berbeda dengan definisi busur panah tradisional yang secara universal digunakan untuk aktivitas olahraga, rekreasi, atau berburu, busur dalam leksikon kriminalitas jalanan di Makassar merujuk pada sebuah senjata rakitan yang sangat spesifik. Senjata proyektil tajam ini terbuat dari paku, besi beton, atau plat baja yang diruncingkan pada bagian ujungnya. Proyektil berbahaya ini kemudian dilontarkan menggunakan ketapel karet yang terbuat dari ban dalam bekas, memberikan daya tembus yang sangat destruktif ketika mengenai sasaran.[5]

Fenomena teror busur ini telah menciptakan dampak psikososial yang luar biasa di tengah masyarakat karena tingkat fatalitasnya yang sangat tinggi.[6] Laporan-laporan kejahatan terkini menunjukkan tingkat fatalitas yang mengerikan dari penggunaan busur ini, yang tidak jarang merenggut nyawa korban, menembus organ vital seperti leher dan wajah, atau meninggalkan cacat anatomis permanen. Hal ini secara akumulatif menciptakan atmosfer teror psikologis yang masif di malam hari bagi warga kota yang beraktivitas di ruang publik. Ketakutan akan ancaman busur acak ini secara langsung membatasi kebebasan mobilitas masyarakat, sekaligus menurunkan kualitas hidup di ruang-ruang urban.[7]

Perspektif sosiologi, khususnya lensa teori Habitus dan Arena dari Pierre Bourdieu [8], memberikan pisau analisis yang sangat tajam untuk membedah akar struktural dari agresi ini. "Lorong" di Makassar tidak bisa lagi direduksi sekadar sebagai pembatas tata ruang atau kawasan pemukiman semata. Lorong telah bertransformasi menjadi sebuah "arena" sosial yang sarat akan kontestasi kekuasaan antarkelompok remaja. Penelitian Alfridus & Teresia mengenai marginalitas urban membuktikan bahwa remaja yang terpinggirkan secara ekonomi sering kali kehilangan akses terhadap pencapaian prestasi akademik atau finansial (modal ekonomi dan budaya).[9] Sebagai mekanisme kompensasinya, mereka membentuk habitus kekerasan yang untuk mengakumulasi "modal simbolik" berupa reputasi, prestise, dan dominasi jalanan. [10] Misalnya, tindakan seorang remaja yang secara demonstratif berjaga di mulut lorongnya sambil memamerkan busur bukanlah sebuah

tindakan irasional tanpa makna. Tindakan tersebut merupakan manuver sadar di dalam arena sosial untuk diakui sebagai “panglima” atau figur yang disegani. Pengakuan atau modal simbolik inilah yang kemudian memberikan mereka identitas, rasa aman, dan privilese di tengah kerasnya kehidupan kelompok marjinal.

Kajian Antropologi juga menawarkan pemahaman krusial bahwa agresi berkelompok ini tidak semata-mata bentuk penyimpangan patologis yang harus diberangus. Subkultur geng bersenjata ini justru beroperasi sebagai “tatanan sosial alternatif” bagi mereka yang merasa diabaikan oleh struktur masyarakat dominan.[11] Kearifan lokal *Siri' Na Pacce*, yang secara historis merupakan falsafah luhur tentang martabat, kehormatan, dan empati, diartikulasikan ulang sebagai instrumen pertahanan identitas. Ketika seorang remaja dari suatu lorong mendapat ejekan terkait status ekonominya atau nama kelompoknya di kolom komentar media sosial, hal tersebut tidak diresepsi sebagai hinaan individu semata. Ejekan tersebut dimaknai sebagai serangan mematikan terhadap *Siri'* komunal lorong tersebut. Respons berupa mobilisasi massa untuk melakukan penyerangan dengan busur kemudian dianggap sebagai sebuah "kewajiban moral" (*Pacce*) demi memulihkan identitas kolektif yang terinjak, menjadikan tindak pidana ini seolah memiliki legitimasi budaya di mata para pelakunya.

Fenomena ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai riak kenakalan remaja biasa atau fase transisi psikologis semata.[12] Kejahatan ini merupakan manifestasi klinis dari kompleksitas masalah yang jauh lebih dalam. Terdapat benang merah yang kuat antara perilaku agresif remaja di Makassar dengan krisis identitas maskulinitas, di mana kekerasan dianggap sebagai jalan pintas untuk meraih validasi sosial dan pengakuan dari kelompok sebaya.[13]

Selain itu, telaah sosiologis mengungkapkan adanya distorsi pemaknaan terhadap kearifan lokal *Siri' Na Pacce* di kalangan remaja jalanan.[14] Falsafah yang sejatinya mengajarkan tentang martabat, kehormatan, dan empati ini telah disalahartikan menjadi lisensi moral untuk melakukan ajang balas dendam komunal. Ketersinggungan sepele sering kali direspons dengan pengerahan massa dan pelepasan anak panah, semata-mata dengan dalih untuk menegakkan kehormatan kelompok yang dianggap telah direndahkan.[15]

Tata ruang kota juga memberikan kontribusi yang prediktif terhadap pola kejahatan teritorial ini.[16] Stratifikasi ruang urban di Makassar melahirkan fenomena segregasi spasial yang dikenal dengan sebutan "anak lorong". Lorong-lorong sempit dan padat penduduk ini bukan hanya sekadar batas geografis, melainkan telah menjelma menjadi identitas komunal yang diklaim dan dipertahankan secara agresif dari kelompok luar. Invasi terhadap wilayah ini senantiasa memicu tawuran massal yang melibatkan senjata busur.[17]

Kompleksitas ini semakin diperparah dengan adaptasi subkultur terhadap ruang digital. Media sosial saat ini digunakan sebagai katalisator konflik, ruang provokasi antarkelompok, serta medium pameran eksistensi pasca-penyerangan. Digitalisasi ini mempercepat laju mobilisasi massa dan memudahkan para pelaku untuk merencanakan tindak kejahatan dalam waktu yang sangat singkat.

Di sisi lain, penanganan secara konvensional melalui pendekatan penegakan hukum murni seringkali menemui kebuntuan struktural dan yuridis.[18] Mayoritas pelaku yang masih berada di bawah umur memunculkan dilema etis dan legal bagi penyidik kepolisian. Terdapat benturan yang nyata antara kebutuhan untuk memberikan sanksi pidana yang tegas demi keamanan

publik, dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara absolut mewajibkan pengarusutamaan keadilan restoratif bagi pelaku anak.[19]

Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini disusun untuk membedah masalah tersebut secara lebih terstruktur.[20] Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana distorsi nilai kultural dan maskulinitas memengaruhi kejahatan busur di Makassar? 2) Bagaimana subkultur kekerasan ini terbentuk berdasarkan teori kriminologi? 3) Bagaimana tantangan penegakan hukum dan kebijakan yang ada? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna kearifan lokal, membedah profil subkultur geng bersenjata, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan institusional dalam memitigasi teror kekerasan remaja di Makassar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi desain studi kepustakaan murni (*literature review*) yang bersandar sepenuhnya pada pendekatan kualitatif dari perspektif sosiologi dan kriminologi. Pengumpulan data dijalankan secara ketat melalui teknik dokumentasi yang menyasar sumber-sumber sekunder yang valid, meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi (nasional maupun internasional), buku teks utama, dokumen regulasi perundang-undangan, hingga laporan resmi dari institusi kepolisian. Penelusuran kepustakaan pada basis data akademis memanfaatkan metode pencarian *Boolean search* dan *Publish or Perish 8* dengan kata kunci spesifik guna memastikan tingkat akurasi informasi.

Penyeleksian literatur dilakukan dengan menetapkan parameter inklusi dan eksklusi yang sangat rigid demi menjamin relevansi, validitas, serta kebaruan analisis. Kriteria inklusi secara spesifik membatasi dokumen pada terbitan rentang sepuluh tahun terakhir (2016-2026), menetapkan fokus spasial secara eksklusif di wilayah hukum Kota Makassar atau kawasan sub-urban di sekitarnya, serta mewajibkan fokus tematik pada kajian senjata rakitan busur, krisis maskulinitas, dan distorsi kearifan lokal. Sementara, kriteria eksklusi dilakukan untuk menyaring secara tegas dan menolak masuknya artikel opini yang tidak melalui proses peninjauan sejawat (*non-peer-reviewed*), tulisan dari blog pribadi, serta menyingkirkan studi mengenai tawuran di luar ekosistem spasial Makassar yang terbukti memiliki ekologi tata ruang dan landasan sosiokultural yang sangat berbeda.

Proses sintesis terhadap data yang telah lolos tahapan seleksi tersebut kemudian dieksekusi melalui prosedur analisis tematik yang sistematis. Peneliti mereduksi dan mengelompokkan temuan-temuan kepustakaan ke dalam koding tema besar, kemudian membenturkan realitas angka kriminalitas penegakan hukum dengan temuan kualitatif makro yang dihasilkan dari kajian akademis. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan instrumen dari teori-teori fundamental, seperti Teori Habitus dan Arena dari Pierre Bourdieu, Teori Maskulinitas Hegemonik dari R.W. Connell, serta Teori Subkultur Kekerasan dari Wolfgang dan Ferracuti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Anatomi Subkultur Kekerasan dan Sosiologi Ruang "Anak Lorong"**

Kekerasan busur di Makassar tidak beroperasi pada ruang hampa, melainkan difasilitasi oleh kebijakan ekologi perkotaan dan tata ruang yang timpang.[21] Kota Makassar memiliki struktur tata ruang urban yang secara masif

didominasi oleh pemukiman padat berbentuk lorong. Perspektif sosiologi ruang (*spatial sociology*) membedah lorong bukan sekadar batas geografis atau infrastruktur fisik, melainkan sebuah instrumen konstruksi sosial yang secara aktif mendikte identitas dan pola interaksi penghuninya.[22] Kebijakan tata ruang kota yang acap kali memusatkan pembangunan fasilitas publik, sarana rekreasi, dan ruang terbuka hijau secara eksklusif di pusat bisnis atau area komersial secara tidak langsung menciptakan segregasi spasial yang meminggirkan kelompok ekonomi bawah.

Minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau atau fasilitas publik yang inklusif di kawasan padat penduduk menyebabkan remaja kehilangan akses terhadap "ruang ketiga" untuk berinteraksi secara sehat. Kondisi tersebut memaksa lorong-lorong sempit yang tersembunyi dari pengawasan formal negara, seperti jangkauan patroli kendaraan besar kepolisian, bertransformasi menjadi laboratorium sosial di mana norma-norma subkultur kekerasan diproduksi secara kolektif. Ketiadaan akses terhadap ruang publik yang inklusif ini memaksa remaja marginal untuk menjadikan lorong berskala sempit sebagai satu-satunya episentrum aktualisasi diri dan interaksi sosial.

Stigma peyoratif dari masyarakat luar terhadap kawasan kumuh justru memicu proses internalisasi identitas devian pada diri remaja tersebut, sehingga mereka mengklaim lorong sebagai daerah kekuasaan mutlak yang eksklusif. Identitas "anak lorong" kemudian bermutasi menjadi sebuah entitas komunal yang sangat konfrontatif, tertutup, dan reaktif terhadap setiap bentuk penetrasi dari pihak luar.

### **Distorsi Nilai Kultural "Siri' Na Pacce" dan Hegemoni Maskulinitas**

Berdasarkan kajian literatur terhadap sejarah masyarakat Bugis-Makassar, *Siri' Na Pacce* berfungsi sebagai fondasi utama dari sistem nilai, norma, dan aturan-aturan adat (*pangadakkang*) yang luhur.[23] Nilai ini pada asalnya mengarahkan individu untuk hidup beradab, beretika, dan menjunjung tinggi harga diri melalui pencapaian prestasi dan sikap saling menghormati. Konsep *Pacce* secara khusus mengajarkan empati yang mendalam terhadap penderitaan sesama, menciptakan jaring pengaman sosial yang dilandasi oleh solidaritas kemanusiaan.[24]

Namun, seiring dengan dinamika urbanisasi, penelitian sosiologis modern di wilayah Makassar mengidentifikasi bahwa aktualisasi nilai luhur ini telah mengalami distorsi yang parah di kalangan remaja marginal.[25] *Siri'* yang bermakna harga diri telah direduksi menjadi legitimasi atas ego personal yang rapuh. Ketersinggungan akibat hal sepele di jalan raya, seperti bunyi knalpot bising atau tatapan mata, dianggap sebagai serangan terhadap *siri'* yang hanya dapat dibalas dengan pertumpahan darah. Pada titik ini, *siri'* bergeser menjadi spektrum kriminogenik yang memfasilitasi tindakan pidana.

Kajian data kuantitatif dari studi terdahulu membuktikan bahwa pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* menuju spektrum kriminogenik ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan, yakni sebesar 52,1%, terhadap peningkatan total tindakan kriminal di kalangan masyarakat Bugis-Makassar.[26] Angka ini menunjukkan bahwa alasan "membela harga diri" merupakan motif rasionalisasi utama yang dipegang teguh oleh pelaku kekerasan. Hilangnya esensi *pacce* (empati) membuat para remaja ini tidak lagi merasakan penyesalan ketika anak panah yang mereka lepaskan menembus tubuh korban yang tidak bersalah.[27]

Pergeseran nilai kultural ini bertautan secara tak terpisahkan dengan konstruksi maskulinitas hegemonik di kalangan remaja urban. Dalam konsep yang diperkenalkan oleh R.W. Connell, maskulinitas hegemonik menuntut laki-laki untuk memvalidasi kejantanan mereka melalui dominasi dan agresi.[28] Ketiadaan perlawanan dalam menghadapi tantangan dari kelompok lawan dianggap sebagai bentuk pengebirian status kelelakian di mata komunitas sebayanya. Akibatnya, remaja merasa memiliki kewajiban sosial untuk tampil beringas.

Dalam subkultur tawuran masa kini, busur panah rakitan telah merepresentasikan ulang instrumen senjata tajam (seperti badik) sebagai proyektil utama untuk mengamankan identitas maskulin tersebut. Membawa busur ke dalam arena tawuran jalanan bukan sekadar persiapan perang, melainkan sebuah performa teatral maskulinitas yang dirancang untuk mengintimidasi lawan dan mendulang pengakuan heroik dari anggota geng. Tindakan ini merupakan bukti betapa tekanan sosial untuk menjadi "laki-laki sejati" mampu mendorong remaja masuk ke dalam jurang kriminalitas mematikan.[29]

### **Anatomi Subkultur Kekerasan: Geng Motor, Teritorialitas, dan Teori Asosiasi Diferensial**

Kekerasan busur di Makassar tidak beroperasi dalam ruang hampa; ia merupakan produk turunan dari sebuah subkultur geng yang telah matang. Genealogi geng motor di kota ini berevolusi dari arena balap liar yang marak pada era 1990-an. Dari sekadar ajang adu kecepatan, kelompok-kelompok pemuda ini mulai menggunakan instrumen kekerasan dan mobilisasi massa untuk menyelesaikan sengketa wilayah, taruhan, atau konflik ego. Transformasi ini melahirkan belasan komunitas geng motor yang bersifat cair namun mematikan.[30]

Secara spasial, penguasaan ruang atau teritorialitas memainkan peran esensial dalam memetakan letupan kekerasan ini.[31] Kota Makassar memiliki tata ruang urban yang didominasi oleh *lorong* (gang sempit pemukiman). Dalam perspektif spasial, lorong menjadi batas imajiner sosiopolitik yang secara kuat membentuk identitas komunal "anak lorong". Stigma peyoratif dari masyarakat luar justru membuat para remaja ini menginternalisasi identitas devian mereka (sepaimana dijelaskan dalam Teori Pelabelan) dan mengklaim lorong tersebut sebagai daerah kekuasaan mutlak.

Transmisi nilai kekerasan dalam komunitas lorong dan geng motor ini dapat dijelaskan secara presisi melalui Teori Asosiasi Diferensial yang digagas oleh Edwin H. Sutherland.[32] Teori ini menegaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi intensif dalam kelompok teman sebaya (*peer group*). Remaja baru yang bergabung dengan geng motor diajarkan bukan hanya teknik merakit dan menembakkan busur, tetapi juga diajarkan rasionalisasi bahwa menembak lawan adalah perbuatan heroik dan bagian dari kewajiban membela kelompok.[33]

Pendekatan *Subculture of Violence* (Wolfgang & Ferracuti) memperkuat analisis ini dengan menyatakan bahwa di dalam geng tersebut, kekerasan tidak lagi dianggap menyimpang, melainkan sebuah ekspektasi normatif.[34] Mereka menciptakan hukum jalanan mereka sendiri (*code of the street*), di mana penolakan terhadap perintah penyerangan akan dibalas dengan sanksi pengucilan yang jauh lebih ditakuti ketimbang ancaman kurungan penjara.

Alhasil, subkultur ini merawat siklus dendam lintas generasi antar-lorong. Sebuah kelompok merasa diwajibkan untuk melakukan penyerangan balasan hanya karena sejarah konflik lama yang bahkan tidak dipahami secara utuh oleh anggota-anggota barunya. Solidaritas buta inilah yang menjadi bahan bakar utama yang membuat tawuran busur di Makassar menjadi fenomena epidemik yang teramat sulit untuk dipadamkan secara permanen.

### **Komodifikasi Digital dan Ekosistem Persenjataan**

Meningkatnya prevalensi dan keberanian para remaja menggunakan busur bersumber langsung dari terjangkaunya infrastruktur persenjataan itu sendiri.[35] Penggerebekan bengkel-bengkel liar oleh aparat sering kali menemukan ratusan mata anak panah yang terbuat dari paku beton modifikasi yang siap edar. Rantai pasok mandiri ini memastikan bahwa amunisi untuk tawuran malam tidak pernah habis.

Selain material yang didapatkan dari sisa bahan bangunan atau toko besi lokal, komponen pendorong pelontar busur juga teramat murah.[36] Karet ban dalam bekas dan tali rafia merupakan barang rongsokan yang dapat disulap menjadi ketapel dengan daya lontar yang sanggup menembus tengkorak manusia. Rendahnya "biaya" untuk menjadi seorang pembunuh ini mengeliminasi batasan ekonomi bagi remaja kelas bawah untuk ikut serta mempersenjatai diri mereka secara penuh.

Fenomena ini juga dijelaskan melalui Teori Netralisasi, di mana remaja pelaku mampu meredakan rasa bersalah mereka setelah merakit dan menggunakan senjata tajam tersebut.[37] Mereka secara kognitif membenarkan kejahatan mereka dengan berdalih bahwa busur tersebut hanyalah instrumen pertahanan diri, atau sekadar wujud solidaritas untuk melindungi teman yang diancam. Mekanisme pembenaran ini melunturkan kendali moral dan menghilangkan empati terhadap korban yang terluka.

Sementara perkembangan pesat media sosial telah menjadi ruang inkubasi baru bagi kejahatan ini. [38] Globalisasi media digital berfungsi ganda sebagai katalisator konflik sekaligus etalase bagi subkultur kekerasan. Platform berbagi video sering digunakan sebagai arena *cyber-bullying* untuk memprovokasi kelompok lawan. Saling ejek di dunia maya ini secara cepat tereskalasi menjadi ajakan untuk bertemu secara fisik dan berduel menggunakan senjata mematikan di jalan raya.

Selain memicu konflik, media sosial digunakan secara efisien sebagai medium konsolidasi massa secara instan. Pesan berantai dalam grup aplikasi komunikasi mampu memobilisasi puluhan anggota geng dari berbagai titik di kota untuk berkumpul dan melakukan konvoi hanya dalam hitungan menit. Transformasi komunikasi ini membuat pergerakan kelompok kriminal menjadi sangat terdesentralisasi, cair, dan sulit dicegat oleh aparat keamanan.

Di sisi lain, publikasi konten kekerasan (berupa foto busur, konvoi mengerikan, atau video korban) di media sosial digunakan oleh para pelaku sebagai portofolio untuk membangun reputasi menakutkan (*clout*) di hierarki jalanan. Validasi dari warganet atau kelompok sebaya di dunia maya memberikan kepuasan psikologis yang memperkuat konstruksi maskulinitas hegemonik mereka. Ketergantungan pada atensi digital ini pada akhirnya membuat teror busur menjadi sebuah tontonan kejahatan yang direplikasi terus-menerus.

Peran media sosial tidak sekadar memindahkan lokasi provokasi ke dunia maya, tetapi secara fundamental mengubah anatomi permusuhan. Algoritma platform digital secara sistematis menciptakan fenomena *Cyber-Balkanization*, yakni terpecahnya pengguna internet ke dalam faksi-faksi virtual yang tertutup dan radikal. Pada ruang gema (*echo chamber*) ini, sirkulasi informasi terjadi secara seragam tanpa adanya ruang untuk narasi atau wacana penyeimbang.[39]

Sirkulasi narasi di dalam *echo chamber* tersebut secara eksklusif hanya berisi glorifikasi kekerasan, pelecehan terhadap simbol kelompok lawan, dan rasionalisasi tindakan kriminal. Paparan konten yang sangat homogen ini mengunci kognisi para remaja ke dalam bias konfirmasi ekstrem, membuat mereka meyakini bahwa agresi bersenjata adalah satu-satunya mekanisme pertahanan yang valid dan membanggakan. Solidaritas buta tumbuh subur karena setiap anggota grup secara kolektif memvalidasi tindakan destruktif tersebut sebagai puncak heroisme maskulin

### **Paradoks Penegakan Hukum dan Kebijakan Sosial**

Menghadapi kompleksitas kejahatan komunal berbasis subkultur ini, institusi penegak hukum dihadapkan pada tantangan operasional dan yuridis yang berat. Kepolisian telah mengimplementasikan strategi pre-emptif dan preventif secara ekstensif melalui penyuluhan dan patroli skala besar. Namun, ketika fase tersebut gagal, tindakan represif penyidik sering kali membentur kendala ekologis, seperti minimnya pencahayaan dan absennya kamera pemantau (CCTV) di lorong-lorong rawan, yang mengaburkan proses identifikasi visual para pelaku.

Tantangan yang paling fundamental bersumber dari status demografis mayoritas pelaku yang masih di bawah umur. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 memang mengatur sanksi pidana penjara yang tegas bagi kepemilikan senjata tajam. Akan tetapi, keberadaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) melalui diversifikasi mediasi bagi pelaku anak.

Implementasi mediasi hukum ini ironisnya kerap memunculkan paradoks. Penyelesaian "damai" yang sebatas kompensasi medis dan permohonan maaf sering kali hanya menghentikan konflik di atas kertas. Karena akar masalah kognitif berupa dendam kultural (*siri'*) belum terselesaikan, perjanjian damai tersebut acap kali dilanggar, memicu letupan pembusuran lanjutan yang lebih masif. Hal ini menciptakan siklus residivisme di kalangan penjahat jalanan remaja.

Ditinjau dari Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi), disfungsi peradilan ini hanyalah muara dari kegagalan elemen hulu: putusnya ikatan konvensional remaja (*attachment*) dengan institusi keluarga dan sekolah. Ketidakmampuan orang tua dalam mengawasi anak dan ketiadaan kegiatan positif (*involvement*) membuat para remaja memilih jalanan sebagai arena sosialisasi utama.[40] Kelemahan struktural inilah yang harus diperbaiki secara komprehensif oleh negara.

Menyikapi hal tersebut, intervensi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui program "Jagai Anakta" (Jaga Anak Kita) [41] merupakan langkah rekayasa kebijakan yang patut dioptimalkan. Program ini menitikberatkan pada perlindungan psikososial, edukasi orang tua, serta

penyediaan fasilitas vokasional atau pelatihan kerja bagi anak putus sekolah. Pemberian keterampilan ini bertujuan untuk mensubstitusi luang waktu yang kriminogenik menjadi kegiatan ekonomi produktif, yang secara jangka panjang terbukti lebih rasional dalam memutus rantai pasok geng busur dibandingkan sekadar hukuman pemenjaraan.

#### D. KESIMPULAN

Fenomena subkultur kekerasan busur di Kota Makassar bukan sekadar wujud kenakalan remaja yang linier, melainkan produk dari serangkaian krisis multidimensi yang melibatkan segregasi ruang urban, hegemoni maskulinitas yang menyimpang, dan eskalasi provokasi di ruang digital (*Cyber-Balkanization*). Realitas sosiologis menunjukkan bahwa remaja termarginalisasi menjadikan kawasan pemukiman padat atau "lorong" sebagai arena eksklusif untuk mengakumulasi modal simbolik berupa reputasi dominasi dan ketakutan. Tindakan kriminal ini secara keliru mereka legitimasi dengan menggunakan tameng kearifan lokal *Siri' Na Pacce* sebagai tatanan sosial alternatif untuk melawan marginalisasi struktural yang mereka alami. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pun kerap dihadapkan pada kebuntuan, mengingat instrumen penegakan hukum formal sering kali gagal membongkar akar sosiokultural dari kejahatan ini tanpa mengorbankan asas keadilan restoratif.

Kebijakan preventif dan mitigasi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, seperti program "Jagai Anakta", berisiko tinggi terjebak pada pendekatan normatif-paternalistik yang statis jika hanya mengandalkan imbauan moral satu arah dari birokrasi pemerintahan atau aparat kepolisian. Restrukturisasi kebijakan harus bergeser dari sekadar pengawasan administratif menuju rekayasa sosial komprehensif yang menyentuh akar kultural masyarakat. Program "Jagai Anakta" mutlak memerlukan injeksi metodologi *Community-Based Intervention* (Intervensi Berbasis Komunitas) yang beroperasi langsung di episentrum pembentukan habitus kekerasan tersebut. Intervensi sosiologis ini tidak lagi memposisikan remaja jalanan sekadar sebagai objek ancaman hukum, melainkan sebagai subjek rentan yang membutuhkan proses dekriminialisasi pemikiran melalui pendampingan organik yang sebaya dan kultural.

Pendekatan intervensi berbasis komunitas ini mensyaratkan kolaborasi strategis dengan figur-figur otoritatif lokal, khususnya tokoh adat yang memiliki otoritas interpretasi terhadap budaya Bugis-Makassar, serta mantan pelaku kekerasan (*desisters*) yang telah berhasil mereintegrasi dirinya secara positif ke tengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Santoso, *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Depok, Indonesia: Rajawali Press, 2025.
- [2] A. L. Pangesti, B. P. Putra, A. K., and C. N. Setyaningrum, "Studi Literatur Dinamika Perkembangan Anak: Lingkungan Membentuk Karakter Remaja," *Indonesian Journal of Education*, vol. 2, no. 1, pp. 408-413, 2025. <https://doi.org/10.71417/ije.v2i1.516>
- [3] Ahmadin, "A Frightening Public Space: The Social Phenomenon of Motorcycle Gangs on the Highways of Makassar City 2014," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, vol. 8, no. 2, pp. 2541-2545, 2024. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.434>

- [4] A. Amsa, "Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah dalam Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Kota Makassar," M.S. thesis, Univ. Bosowa, Makassar, Indonesia, 2023. <https://repositori.unibos.ac.id/items/18a8d206-33f5-43a0-ae2f-d813152cfb85>
- [5] A. M. R. Saldi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)," Skripsi, Univ. Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/36714/>
- [6] M. Hadrianto, R. R. Chendra, A. F. Fawwaz, A. R. Amirullah, H. S. Hamran, and G. M. Tinungki, "Melacak Jejak Pa'busur: Investigasi Agresivitas dan Pemetaan Wilayah Rawan Sebagai Upaya Meningkatkan Sense of Security Masyarakat di Kota Makassar," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, vol. 6, no. 2, pp. 109-122, 2024. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS/article/view/36152>
- [7] A. Amsa, "Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah dalam Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Kota Makassar," M.S. thesis, Univ. Bosowa, Makassar, Indonesia, 2023 <https://repositori.unibos.ac.id/items/18a8d206-33f5-43a0-ae2f-d813152cfb85>
- [8] Darmawan. Pierre Bourdieu's Theory of Social Practice: Understanding Habitus, Capital, and the Arena in Social Life. *Journal La Sociale*, 5(6), 2175-2187, 2024. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i6.2131>
- [9] A. Y. Sasi, T. N. Derung. Fenomena Urbanisasi dan Dampaknya Terhadap Marginalisasi Sosial Menurut Octogesima Adveniensi. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(1), 1-6, 2024 <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v5i1.2656>
- [10] Darmawan. Pierre Bourdieu's Theory of Social Practice: Understanding Habitus, Capital, and the Arena in Social Life. *Journal La Sociale*, 5(6), 2175-2187, 2024. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i6.2131>
- [11] D. Sanguineti, M. Cecilia & Jovchelovitch, Sandra. Is violence ever right? Moral reasoning about violence among youngsters belonging to gangs and peacebuilding groups. *Psychology of Violence*, 11(2), 123 – 132. 2021. <https://doi.org/10.1037/vio0000376>
- [12] N. F. Mappaselleng, "Street Children Phenomenon in Makassar City: A Criminologi Analysis," *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, pp. 1-12, 2021 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no1.1915>
- [13] C. B. Harahap, A. I. Triyoga, and W. Prafitri, "Maskulinitas pada Budaya Kejahatan Geng Klitih: Sebuah Analisis Konstruksi Sosial," *Jurnal Borneo Sosial & Budaya*, vol. 8, no. 4, pp. 477-490, 2024. <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v8i4.17204>
- [14] F. Anjana *et al.*, "Siri'na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar," *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, vol. 2, no. 2, pp. 203-209, 2025. <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/97>
- [15] M. Piara, I. Irdianti, and N. Hidayati, "Siri' na Pacce dalam Krisis Sosial: Menelusuri Peran Budaya dalam Konflik dan Kekerasan di Sulawesi Selatan," *SOCIETIES: Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 5, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.26858/societies.v5i2.81220>
- [16] M. A. R. Saputra and R. Susanti, "Perilaku Menyimpang Remaja Perkotaan," *Jurnal Nusantara*, vol. 12, no. 7, pp. 2908-2918, 2024. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i7.2025.2908-2918>

- [17] M. D. Backer, "Between place and territory: Young people's emotional geographies of security and insecurity in Brussels' deprived areas," *Emotion, Space and Society*, vol. 45, Art. no. 100911, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.emospa.2022.100911>
- [18] E. Setiadi, "Membangun Sistem (Penegakan) Hukum," dalam *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Thafa Media, 2021, hlm. 667-676.
- [19] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- [20] T. Santoso, *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Depok, Indonesia: Rajawali Press, 2025.
- [21] M. A. R. Saputra and R. Susanti, "Perilaku Menyimpang Remaja Perkotaan," *Jurnal Nusantara*, vol. 12, no. 7, pp. 2908-2918, 2024. <https://doi.org/10.31604/jjips.v12i7.2025.2908-2918>
- [22] R. Azarian. Social construction of places as meaningful objects: a symbolic interactionist approach, *International Review of Sociology*, 33:3, 546-564. 2023. <https://doi.org/10.1080/03906701.2023.2259060>
- [23] A. W. Gani and H. A. Gani, "Culture of Siri' Na Pacce As Part of Legal Awareness of the Bugis-Makassar Community," dalam *Proc. 3rd International Conference on Humanities Education, Law and Social Sciences (ICHELSS)*, 2024, hlm. 687-701. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14891>
- [24] Hasni, N. Supriatna, Sapriya, M. Winarti, and E. Wiyanarti, "Integration of Bugis-Makassar Culture Value of Siri' Na Pacce' In Studies Learning in The Digital Age," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, vol. 14, no. 4, pp. 5959-5968, 2022. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2151>
- [25] Ahmadin, "Makassar City and Public Space Without Siri' and Pacce," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1, pp. 135-142, 2023. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i1.285>
- [26] N. R. Rahmi, "Dampak Pergeseran Nilai Siri' Na Pacce Terhadap Tindakan Kriminal Masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini," M.S. thesis, Univ. Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, 2023. <https://repository.upi.edu/89762/>
- [27] M. Piara, Irdianti, and N. Hidayat, "Siri' Na Pacce dalam Krisis Sosial: Menelusuri Peran Budaya dalam Konflik dan Kekerasan Sulawesi Selatan," *SOCIETIES: Journal of Social Science and Humanities*, vol. 5, no. 2, pp. 233-241, 2025. <https://doi.org/10.26858/societies.v5i2.81220>
- [28] L. Allen, "Hegemonic Masculinity and Addressing Gender Inequality," *The Journal of Men's Studies*, vol. 33, no. 3, pp. 575-591, 2025. <https://doi.org/10.1177/10608265251329561>
- [29] C. B. Harahap, A. I. Triyoga, and W. Prafitri, "Maskulinitas pada Budaya Kejahatan Geng Klitih: Sebuah Analisis Konstruksi Sosial," *Jurnal Borneo Sosial & Budaya*, vol. 8, no. 4, pp. 477-490, 2024. <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v8i4.17204>
- [30] N. F. Mappaselleng, "Street Children Phenomenon in Makassar City: A Criminologi Analysis," *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, pp. 1-12, 2021 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no1.1915>

- [31] G. Pratama, M. Z. Al Khaer Zahir, F. Alan Syahrier, M. W. Anshori, and W. Astuti, "Effectiveness of Street Children Handling Policy amid Urban Spatial Inequality: A Case Study in Makassar City, Indonesia," *Golden Ratio of Data in Summary*, vol. 5, no. 3, pp. 329–338, 2025. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i3.1441>
- [32] C. Melis-Rivera and C. Piñones-Rivera, "Criminology and identity: A theoretical review," *Revista Criminalidad*, vol. 65, no. 3, pp. 65-79, 2023. <https://doi.org/10.47741/17943108.523>
- [33] M. A. R. Saputra and R. Susanti, "Perilaku Menyimpang Remaja Perkotaan," *Jurnal Nusantara*, vol. 12, no. 7, pp. 2908-2918, 2024. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i7.2025.2908-2918>
- [34] I. F. Edrisy, Kamilatun, and A. Putri, *Kriminologi*. Bandarlampung, Indonesia: Pusaka Media, 2023.
- [35] A. Amsa, "Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah dalam Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Kota Makassar," M.S. thesis, Univ. Bosowa, Makassar, Indonesia, 2023. <https://repositori.unibos.ac.id/items/18a8d206-33f5-43a0-ae2f-d813152cfb85>
- [36] A. M. R. Saldi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)," Skripsi, Univ. Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/36714/>
- [37] C. J. Hisyam, A. Yusli, E. K. Making, R. A. A. Pratama, R. Priambodo, and R. Y. Baihaqqi, "Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas," *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan*, vol. 2, no. 1, pp. 91-98, 2024. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i1.165>
- [38] C. B. Harahap, A. I. Triyoga, and W. Prafitri, "Maskulinitas pada Budaya Kejahatan Geng Klitih: Sebuah Analisis Konstruksi Sosial," *Jurnal Borneo Sosial & Budaya*, vol. 8, no. 4, 2024. <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v8i4.17204>
- [39] C. Bail. *Breaking the Social Media Prism: How to Make Our Platforms Less Polarizing*. Princeton University Press. 2021
- [40] T. Santoso, *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Depok, Indonesia: Rajawali Press, 2025
- [41] I. Sumiati., Suyitno, and Bakhtiar, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)," *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 23-35, 2023 <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.42>